



Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak

Kennardi Tanujaya^{1)*}, Elva Anggreany²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam

¹kennardi.tanujaya@uib.ac.id, ²elvaanggreany00@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 1 November 2021

Disetujui : 17 November 2021

Dipublikasikan : 29 Desember 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak dan juga memperluas literatur yang ada dengan memeriksa efek mediasi dari kinerja keberlanjutan pada hubungan antara gender dan penghindaran pajak dalam konteks Indonesia. Penelitian ini akan menguji seluruh perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria selain sektor keuangan dari tahun 2016-2020. Penghindaran pajak yang merupakan variabel dependen diukur dengan CETR (Cash Effective Tax Rate) dengan menggunakan software partial least square (PLS). Sampel yang digunakan sebanyak 148 perusahaan dengan menggunakan prosedur purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, keberagaman gender berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, tetapi dengan dimasukkan kinerja keberlanjutan sebagai variabel mediasi dalam hubungan keberagaman gender dan penghindaran pajak menunjukkan hasil tidak signifikan..

Kata Kunci:
penghindaran pajak, dewan direksi, ukuran dewan direksi, keberagaman gender, kinerja keberlanjutan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the size of the board of directors on tax avoidance and also to expand the existing literature by examining the mediating effect of sustainability performance on the relationship between gender and tax avoidance in the Indonesian context. This study will examine all companies listed on the Indonesia Stock Exchange that meet the criteria other than the financial sector from 2016-2020. Tax avoidance which is the dependent variable is measured by CETR (Cash Effective Tax Rate) using partial least squares (PLS) software. The sample used was 148 companies using a purposive sampling procedure. The results of this study indicate that the size of the board of directors has no significant effect on tax avoidance, gender diversity has a significant negative effect on tax avoidance, but with the inclusion of sustainability performance as a mediating variable in the relationship between gender diversity and tax avoidance, the results are not significant.

Keywords:
tax avoidance, board of directors, board size, gender diversity, sustainability performance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur penting dan bahkan terpenting bagi negara agar anggaran negara tetap terjaga. Jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lain, penerimaan perpajakan di Indonesia memiliki persentase tertinggi. Wajib pajak tidak ada yang bersedia membayar pajak, tetapi tidak ada pilihan selain menurut (Tandean & Winnie, 2016). Pajak bersifat hukuman karena memungkinkan setiap orang atau kelompok untuk membayar denda jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sudut pandang wajib pajak, pajak menjadi beban karena menurunkan penghasilannya dan juga tidak mendapatkan imbalan langsung saat membayar pajak (Mais & Patminingih, 2017).

Manajemen pajak dipisahkan menjadi dua kategori, pertama adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yaitu melakukan manajemen pajak dengan cara sah, karena tidak melanggar ordonansi yang ada (*lawful*). Kedua adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu manajemen pajak yang dianggap ilegal atau melanggar hukum karena tata caranya melanggar regulasi yang ada (*unlawful*) (Sunarsih & Handayani, 2018). Penghindaran pajak bersifat tidak melanggar hukum, sehingga pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada wajib pajak atau badan yang melakukan penghindaran pajak. Meskipun setiap negara mempunyai peraturan anti penghindaran pajak, perusahaan di berbagai negara tetap menghalalkan beraneka macam cara untuk melakukan penghindaran pajak, bahkan perusahaan rela menyewa akuntan yang mahal untuk menemukan cara yang rumit agar dapat membayar lebih sedikit pajak (Annuar *et al.*, 2014). Penghindaran pajak secara tradisional dipandang sebagai strategi untuk transfer kekayaan dari negara ke korporasi, yang dimana dapat meningkatkan nilai perusahaan secara efisien. Maka dari itu penghindaran pajak merupakan persoalan yang harus diperhatikan karena menyangkut pendapatan negara (Chen *et al.*, 2014).

Tata kelola memainkan peranan yang cukup penting dalam tindakan penghindaran pajak. Kewajiban eksekutif tidak hanya mampu menambah nilai perusahaan, penghindaran pajak oleh perusahaan juga ada di keputusan para eksekutif (Butje & Tjondro, 2014). Sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan, seorang eksekutif tentu memiliki karakter yang berbeda. Perilaku pemimpin perusahaan mungkin mengambil risiko, menghindari risiko atau netral terhadap risiko. Karakter eksekutif perusahaan dalam hal tingkat pengambilan risiko akan tercermin pada tingkat risiko yang dihadapi perusahaan (Novita, 2016).

Pengawasan diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan perpajakan agar langkah pengelolaan perpajakan yang dilakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu mekanismenya adalah pengawasan yang dilakukan oleh para dewan perusahaan. Bisnis suatu perusahaan dijalankan oleh dewan direksi dimana direksi melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi jangka panjang, rancangan kerja, anggaran perseroan serta ketetapan anggaran dasar. Keputusan asosiasi juga terdapat ditangan dewan dalam perusahaan (Mais & Patminingih 2017).

Menurut Mangoting *et al.*, (2020), ukuran dewan direksi merupakan faktor penting dalam mengendalikan perilaku penghindaran pajak yang agresif dari manajemen. Fungsi pengawasan manajemen eksekutif dari pengambilan keputusan strategis dianggap lebih baik didistribusikan dengan dewan yang lebih besar (Hoseini, Gerayli, & Valiyan 2019). Elemen tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran perpajakan suatu perusahaan adalah keberagaman *gender* dari dewan direksi (Prasetyo, 2019). Perbedaan karakter pria dan wanita akan mempengaruhi sikap dan tindakan yang

diambil. Ada pandangan umum bahwa wanita umumnya lebih menghindari risiko daripada pria (Novita, 2016). Beberapa penelitian menemukan bahwa dewan wanita dikaitkan dengan manajemen laba yang sedikit, akuntansi yang lebih konservatif, dan keputusan pendanaan dan investasi yang kurang berisiko (Huang & Kisgen, 2013). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa dewan wanita cenderung lebih percaya diri dan lebih sering mencari nasihat ahli-ahli dibandingkan rekan pria (Levi, Li, & Zhang 2014).

Fallan dan Fallan (2019) menyebutkan bahwa pajak adalah bagian dari tanggungan sosial perusahaan karena komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR (*Corporate Social Responsibility*) mengacu pada strategi dimana perusahaan mengarahkan bisnisnya dengan cara yang beraturan, ramah terhadap masyarakat dan berguna bagi seluruh masyarakat (Salhi *et al.*, 2019). Berdasarkan teori sosialisasi keberagaman, Liu (2018) menyatakan bahwa perusahaan dengan perwakilan dewan wanita yang lebih besar lebih jarang dituntut karena pelanggaran lingkungan. Teori sosialisasi keberagaman *gender* menunjukkan bahwa wanita lebih mementingkan kesejahteraan para pemangku kepentingan dan lebih cenderung mengambil tindakan dimana untuk menghindari ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi masyarakat. Di bawah teori keberagaman, dewan wanita membawa perspektif yang berbeda dan menawarkan solusi ramah lingkungan yang lebih luas, dimana dapat meningkatkan pengambilan keputusan dewan yang berkaitan dengan lingkungan (Cumming, Leung, & Rui 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, riset ini bertujuan untuk melihat bagaimana dewan direksi mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebagian besar literatur fokus pada hubungan antara pemilik dan manajer dalam mempengaruhi keputusan penghindaran pajak (Wirakusuma, 2019) dan bagaimana kompensasi anggota dewan mempengaruhi keputusan (Santoso & Muid 2014). Namun hingga saat ini, literatur terdahulu yang menganalisis bagaimana dewan direksi mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan secara khusus sangat minim. Studi ini juga memperluas literatur yang ada dengan memeriksa efek mediasi dari kinerja keberlanjutan pada hubungan antara *gender* dan penghindaran pajak dalam konteks Indonesia. Maka dari itu, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak”**

TINJAUAN TEORITIS

Agent theory

Teori keagenan ialah hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen dimana prinsipal mengamanatkan wewenang kepada agen untuk mengoperasikan perusahaan dan membuat keputusan. Menurut teori keagenan, kepentingan pribadi memotivasi orang untuk menyebabkan dilema keagenan (Antwi, 2021).

Terkait penghindaran pajak dalam penelitian ini, masalah keagenan dapat terjadi antara fiskus dan manajemen perusahaan. Masalah keagenan terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan antara pemungut pajak dan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak. Manajemen sebagai agen berwenang untuk mengelola perusahaan yang akan memanfaatkan peluang yang ada dengan melaksanakan perencanaan pajak untuk menghindari pajak dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan,

sedangkan fiskus sebagai prinsipal, mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Yuni & Setiawan 2019).

Stakeholder theory

Pemangku kepentingan dalam arti luas, adalah individu atau kelompok yang memiliki kepemilikan, hak, atau kepentingan atas tindakan perseroan di masa lalu, sekarang dan masa depan (Benn, Abratt, & O'Leary 2016). Teori pemangku kepentingan didefinisikan sebagai hubungan dan kepercayaan yang berkesinambungan antara pemangku kepentingan dan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menghasilkan nilai perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan (Tarigan & Semuel 2015).

Menurut teori ini, manajemen perusahaan bertanggung jawab bukan hanya kepada pemegang saham dan manajer, tetapi seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan dalam perusahaan beroperasi (Jamei, 2017). Landasan teoritis dan bukti empiris menyiratkan bahwa penghindaran pajak dapat digunakan untuk menghemat uang pajak dan menurunkan biaya perusahaan, yang menghasilkan peningkatan kekayaan pemegang saham (Huseynov & Klamm 2012). Beberapa peneliti menyatakan bahwa perusahaan yang mengeksploitasi pajak ialah perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial dan pasar akan bereaksi negatif terhadap perusahaan tersebut, yang dapat menyebabkan nilai perusahaan yang bersangkutan anjlok. Menurut perspektif 20 tahun dokumen negara, pemerintah akan mendanai pengeluaran saat ini dari pendapatan non-migas dan sebagian besar melalui perpajakan. Hasil statistik program pembangunan ekonomi 5 tahun terakhir menunjukkan pendapatan pajak merupakan bagian yang sangat kecil dari sumber pendapatan negara (Jamei, 2017). Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajaknya, maka dalam hal ini pentingnya studi yang membahas tentang pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak agar pemerintah lebih memahami dan bisa mengatasinya (Mashayekhi & Seyed, 2015)

Lanis dan Richardson (2015) menemukan bahwa hubungan positif dengan kelompok pemangku kepentingan membuat perusahaan yang terdaftar di Australia secara signifikan berkurang dalam tindakan penghindaran pajak. Maka manajemen perusahaan harus melaksanakan semua operasi yang dianggap penting oleh pemangku kepentingan dan harus dapat menciptakan keuntungan bagi pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas perusahaan untuk memenuhi berbagai harapan dan tuntutan informasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau keberadaan perusahaan yang bersangkutan (Fuadah & Kalsum 2021).

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak sebagaimana yang diungkapkan oleh Riguen dan Kachouri (2019) adalah tindakan dimana perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya secara langsung dan tidak langsung tanpa menimbulkan biaya pemeriksaan pajak tambahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti terminologi manajemen lainnya, penghindaran pajak dapat berarti "hal yang berbeda untuk orang yang berbeda" dan karenanya kurang terdapat definisi universal untuk istilah tersebut. Penghindaran pajak suatu perusahaan bermula dari upayanya untuk mengurangi persyaratan pajak berdasarkan penghasilan kena pajak. Perusahaan dapat menghindari jumlah utang yang lebih tinggi dengan memanfaatkan akun investasi yang memberikan perlakuan pajak yang menguntungkan atau melakukan pembelian dan investasi yang secara efektif menurunkan pendapat kena pajak (Rhee, Woo, & Kim 2020).

Kholbadalov (2012) menyatakan penghindaran pajak adalah perangkat untuk melaksanakan *tax saving* dengan cara memindahkan dana yang semestinya dialihkan untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai setelah pajaknya perusahaan meningkat. Dalam teori penghindaran pajak dapat dibagi menjadi perspektif konvensional dan perspektif *principal-agent*. Perspektif konvensional adalah bahwa perusahaan akan meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya melalui penghindaran pajak. Sedangkan perspektif *principal-agent* menyatakan bahwa perusahaan dan manajemen menggunakan penghindaran pajak untuk kepentingan manajemen itu sendiri bukan untuk pemegang saham perusahaan (Chyz, 2013).

Wajib pajak tidak sepenuhnya menafsirkan undang-undang dalam kegiatan penghindaran pajak, namun hanya tidak ditegakkan sesuai dengan arahan dan tuntutan undang-undang (Diantari & Ulupui, 2016). Maka dari itu, penghindaran pajak dianggap hal yang membingungkan karena di satu sisi diizinkan, namun disisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pihak negara. Pemerintah tidak mampu menuntut secara hukum, meskipun penerapan penghindaran pajak ini akan berpengaruh pada penerimaan sektor pajak negara (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini mengikuti Putri and Putra (2017) dan Susilowati, Dewi, dan Wijayanti (2020) menggunakan *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) dengan membagi *cash tax paid* dengan *pretax income*. Pengukuran ini berbeda dengan *ETR* (*Effective Tax Rate*) karena tidak terpengaruh oleh perubahan modifikasi taksiran seperti *valuation allowance* dan *tax cushion*. Semakin tinggi nilai *CETR* menandakan perseroan tidak melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan yang lebih besar memiliki keuntungan dengan lebih banyak informasi yang kolektif sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih baik, termasuk kebijakan dalam tindakan penghindaran pajak (Sumantri, Anggraeni, & Kusnawan 2018). Menurut teori agensi, ukuran dewan direksi yang besar akan membawa keunggulan dalam penentuan keputusan. Dengan membuat keputusan yang tepat maka kemungkinan tindakan penghindaran pajak dapat dihindarkan. Jumlah dewan direksi yang sesuai dengan besarnya perusahaan akan lebih efektif dalam memonitoring kinerja perusahaan dan terbentuknya jaringan yang baik dengan pihak eksternal (Wulandari, 2019).

Menurut penelitian Idzniah dan Bernawati (2020) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran dewan terhadap tindakan penghindaran pajak. Dewan direksi bertindak sebagai pengelola perusahaan sehingga ukuran dewan direksi berdampak pada baik atau tidaknya perusahaan. Perusahaan yang efektif adalah perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan perusahaan, ukuran dewan direksi dapat meningkatkan penghindaran pajak.

Sejalan dengan penelitian Zemzem dan Ftouhi (2013) dan Farida and Prawira (2017) yang menyatakan bahwa tingkat agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh dewan direksi. Dewan direksi adalah mekanisme pengendalian internal utama yang bertugas mengawasi ekuitas manajemen. Semakin besar ukuran dewan direksi akan memungkinkan mereka untuk menjamin bahwa kegiatan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham dalam pengelolaan pajak, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Pemegang saham akan menerima pengembalian yang lebih besar jika utang pajak perusahaan minim. Oleh karena itu masuk akal jika proporsi atau ukuran dewan yang lebih tinggi dapat secara signifikan meminimalkan penghindaran pajak. Maka, bunyi hipotesis 1 adalah sebagai berikut :

H1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Keberagaman *Gender* Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori feminisme, bahwa peningkatan proporsi direktur wanita pada perusahaan berdampak pada keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan, khususnya dalam penghindaran pajak (Putra *et al.*, 2018). Menurut Richardson, Taylor, dan Lanis (2016), kehadiran direktur wanita dapat mengontrol perusahaan menjadi lebih baik. Yang berarti bahwa direktur wanita lebih dapat menghindarkan risiko, lebih mandiri, menaruh standar moral dan etika yang lebih tinggi, dan menyediakan keputusan lebih tepat yang dapat meningkatkan level transparansi dan tingkat kepercayaan dewan. Maka, kehadiran dewan direktur wanita dapat meminimalisasikan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Hoseini dan Gerayli, (2018); Chen, Leung, dan Goergen (2017); Richardson *et al.*, (2016)). Riset yang ditemukan oleh Richardson *et al.*, (2016) yang dimana hasil temuan regresi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang tinggi (lebih dari satu anggota) di dewan direksi menurunkan kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak dibandingkan sama sekali tidak ada. Sejalan dengan studi yang diteliti oleh Chen *et al.*, (2017) mengenai hubungan keberagaman *gender* dewan terhadap penghindaran pajak, yang diuji melalui risiko kredibilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan dengan dewan yang beragam *gender* lebih peduli dengan potensi risiko reputasi yang terkait dengan strategi pajak yang agresif.

Lanis *et al.*, (2017) juga menghasilkan hubungan yang negatif antara diversifikasi *gender* dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Karena direktur wanita yang terlibat dalam hal ini merasa bahwa adalah tanggung jawab sesama untuk membayar pajak untuk membalas budi pemerintah, mereka tidak ingin manajemen meningkatkan penghidaran pajak perusahaan. Akibatnya, anggota dewan direksi wanita berusaha ikut campur dan mencoba mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Menurut Gul *et al.*, (2011) keberagaman *gender* direksi dapat meningkatkan kemahiran dewan untuk melakukan transaksi dengan pengawasan, pengungkapan dan pelaporan yang selektif, serta pemantauan yang cermat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kehadiran wanita dalam dewan direksi perusahaan dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak. Hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H2 : keberagaman *gender* berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Keberagaman *Gender* Terhadap Kinerja Berkelanjutan

Berdasarkan studi yang telah diteliti terdahulu, bahwa wanita umumnya dianggap lebih peka secara sosial dan etis daripada pria, dan dari keseimbangan *gender* tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR (Rao & Tilt, 2016). Sebagian besar penelitian sebelumnya telah mengungkapkan hubungan positif antara pelaporan CSR dan keberagaman *gender* dewan (Isa & Muhammad, 2014; Liao, Lin, & Zhang, 2018; Khan, Khan, & Senturk, 2019; Alazzani *et al.*, 2017). Isa dan Muhammad (2014) dalam risetnya menunjukkan bahwa dibandingkan dengan dewan pria, dewan wanita lebih mempunyai kemampuan, pengalaman, dan prestasi yang berbeda. Karena itu, dewan wanita dapat mendorong bisnis untuk menjadi warga korporat yang lebih baik dan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait CSR.

Sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Liao *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa keberagaman dewan mengarah pada keputusan strategis jaminan CSR. Artinya, dewan yang lebih diversifikasi akan mempengaruhi interpretasi operasi CSR oleh manajemen dan lebih menangkap manfaat komparatif dari jaminan CSR dalam meningkatkan kualitas pengetahuan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Khan, Khan, dan Senturk (2019) juga menghasilkan hubungan positif yang menjelaskan bahwa dengan sumber daya yang beragam lebih cenderung memberikan pengungkapan yang konsisten mengenai topik praktik CSR.

Penelitian Pareek *et al.*, (2021) juga menghasilkan hubungan positif antara kinerja keberlanjutan dan penghindaran pajak. Di dalam penelitian menyatakan menurut teori pemangku kepentingan dan sumber daya, keberagaman *gender* memberi tekanan lebih besar pada perusahaan untuk terlibat dalam beragam praktik lingkungan yang bertanggung jawab secara sosial untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, direktur wanita seharusnya meningkatkan kinerja berkelanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam waktu jangka panjang. Menurut teori legitimasi dan neo-institusional, dimasukkannya direktur wanita ke dalam dewan direksi meningkatkan reputasi perusahaan karena peningkatan akuntabilitas dan komitmen mereka terhadap masyarakat dan lingkungan secara umum (Shahab *et al.*, 2018). Dengan demikian, beberapa teori mempublikasikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas dengan meningkatkan direktur wanita perusahaan dalam hal kinerja lingkungan dan sosial. Secara keseluruhan, terdapat beberapa bukti bahwa keberagaman *gender* berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan, maka :

H3 : Keberagaman *gender* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keberlanjutan

Pengaruh Keberagaman *Gender* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kinerja Keberlanjutan sebagai Variabel Mediasi

Dewan terdiri dari banyak direksi dan komisaris yang dibedakan oleh berbagai latar belakang, kepercayaan, dan kemampuan. Oleh karena itu, setiap dewan dapat memiliki penilaian risiko perusahaan yang berbeda-beda, yang berdampak pada kebijakan dan pelaporan CSR (Rao & Tilt, 2016). Jarboui, Saad, dan Riguen (2020) dalam studinya menghasilkan hubungan negatif dan signifikan antara keberagaman *gender* dan penghindaran pajak dan persentase wanita yang lebih tinggi mempengaruhi kinerja keberlanjutan secara positif dan signifikan. Kinerja keberlanjutan yang dimasukkan sebagai variabel mediator, menunjukkan bahwa kinerja keberlanjutan sepenuhnya memediasi hubungan antara keberagaman *gender* dan penghindaran pajak. Hasil dalam riset yang diteliti oleh Vacca *et al.* (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan dewan wanita dalam pengambilan keputusan perusahaan tidak mempengaruhi hubungan antara agresivitas pajak dan pengungkapan CSR.

Menurut Mao dan Wu (2019) kinerja keberlanjutan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, yang mengakibatkan penghindaran pajak perusahaan yang lebih rendah. Jadi, jika praktik kinerja keberlanjutan perusahaan dipengaruhi oleh direktur wanita, maka kinerja keberlanjutan memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak (Richardson *et al.*, 2016; Hoseini & Gerayli, 2018; Chen *et al.*, 2017). Perusahaan dengan tingkat kinerja keberlanjutan yang lebih tinggi lebih baik dalam mengidentifikasi dan menilai kebutuhan pemangku kepentingan. Maka menghasilkan sistem tata kelola perusahaan yang lebih efektif seperti keberagaman *gender*, yang mengarah pada penyesuaian dan kemampuan beradaptasi dalam organisasi yaitu transformasi proses

manajemen yang sukses dan proses sosial yang lebih baik (Jarboui *et al.*, 2020). Sesuai dengan pembahasan diatas, maka bunyi hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

H4 : Kinerja keberlanjutan memiliki pengaruh terhadap hubungan antara keberagaman *gender* dan penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang merupakan proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat untuk menganalisis informasi tentang topik yang sedang dibahas (Sugiyono, 2018). Data untuk penelitian adalah data sekunder dari laporan tahunan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang meliputi total aset, total liabilitas, pendapatan sebelum dan sesudah pajak, jumlah dewan direktur, dan lain sebagainya. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diukur dengan menggunakan aplikasi *partial least square (PLS)* untuk beberapa jenis pengujian.

Penelitian ini akan menguji seluruh perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria selain sektor keuangan. Penelitian ini mengecualikan perusahaan yang bergerak atau beroperasi di industri keuangan dikarenakan perbedaan praktik akuntansinya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan dimana adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan terhadap kondisi yang dihadapinya. Data yang diambil untuk diamati lebih dari satu periode yaitu tahun 2016-2020 yang merupakan jenis data *times series*. Penelitian dikaji menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan kondisi tertentu (Sugiyono, 2018).

Tabel 1

Daftar Jumlah Perusahaan yang Dijadikan Sampel		
Keterangan	Jumlah	
Perusahaan yang terdaftar di BEI	737	Perusahaan
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria	(502)	Perusahaan
Perusahaan sektor keuangan	(74)	Perusahaan
Perusahaan yang laporan tahunan tidak lengkap	(13)	Perusahaan
Perusahaan yang memenuhi kriteria	148	Perusahaan
Data yang digunakan untuk penelitian	740	Data
Lama tahun penelitian	5	Tahun

Sumber : Data sekunder yang diolah (2021)

Tabel 2

Variabel	Simbol	Pengukuran	Peneliti
Penghindaran Pajak	CETR	Beban pajak/penghasilan sebelum pajak	Barros & Sarmento (2020), Kurniasih & Ratna Sari (2013), Diantari & Ulupui (2016), Sumantri <i>et al.</i> , (2018)

Ukuran Dewan Direksi	BS	Jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan	Isa & Muhammad (2014), Hoseini <i>et al.</i> , (2019), Idzniah & Bernawati (2020)
Keberagaman Gender	GD	Jumlah direksi wanita dalam suatu perusahaan	Pareek <i>et al.</i> , (2021), Riguen & Kachouri (2019), Prasetyo (2019), Jarboui <i>et al.</i> , (2020)
Kinerja Keberlanjutan	SP	Indikator standar GRI (<i>Global Reporting Standard</i>)	Ningrum <i>et al.</i> , (2018), Vacca <i>et al.</i> , (2020)
Solvabilitas	LV	Total ekuitas/total aset	Jati <i>et al.</i> , (2019), Chou <i>et al.</i> , (2013), Riguen & Kachouri (2019), Barros & Sarmento (2020)
Pengembalian Ekuitas	ROE	Laba bersih/total ekuitas	Barros & Sarmento (2020), Sumantri <i>et al.</i> , (2018), Hoseini <i>et al.</i> , (2019)
Perputaran Persediaan	IT	Pendapatan/total persediaan	Barros & Sarmento (2020), Misral <i>et al.</i> , (2020).

Sumber : Data sekunder yang diolah (2021)

PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
CETR	740	0,001	30,064	0,527	1,482
BS	740	2	14	5,370	1,905
GD	740	0,000	0,800	1,320	0,180
SP	740	0,000	1,350	0,066	1,968
LV	740	0,146	8,590	0,600	0,466
ROE	740	-0,510	1,451	0,132	0,157
Inv.turn	740	0,240	902,930	27,624	80,961

Sumber : Data sekunder yang diolah (2021)

Tabel deskriptif di atas menunjukkan berbagai variabel diantaranya variabel independen, variabel dependen, variabel moderasi, dan variabel kontrol. Sesuai dengan yang ditampilkan pada tabel deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah setiap variabel yang *valid* berjumlah 740, yang dimana pengukuran dari penghindaran pajak (Y) menghasilkan nilai terendah sebesar 0,001 dan nilai tertinggi sebesar 30,064, dari periode 2016-2020 diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,527, serta nilai standar deviasi yang sebesar 1,482. Dimana nilai standar deviasi penghindaran pajak lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata standar deviasi untuk pengukuran lain. Maka data penghindaran pajak yang telah diuji lebih beragam dibandingkan dengan pengukuran lain.

Variabel independen pertama ialah ukuran dewan direksi (X1). Nilai terendah ukuran dewan direksi sebesar 2 dan nilai tertinggi sebesar 14. Nilai rata-rata dari penelitian 740 data pada pengukuran ukuran dewan direksi tersebut menghasilkan hasil sebesar 5,370, serta nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 1,905. Nilai rata-rata ukuran dewan direksi lebih besar daripada standar deviasi. Nilai standar deviasi yang rendah berarti data yang diuji kurang beragam.

Variabel independen kedua ialah keberagaman *gender* (X2). Nilai minimum dari keberagaman *gender* sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,800. Nilai rata-rata untuk periode 2016-2020 untuk 740 sampel dari variabel keberagaman *gender* sebesar 1,320, serta nilai standar deviasi sebesar 0,180 yang artinya nilai rata-rata keberagaman *gender* periode 2016-2020 lebih kecil dari nilai standar deviasi sehingga abnormalitas data yang terjadi rendah maka pemencaran nilainya merata.

Pengukuran untuk variabel moderasi terdiri dari 3 indikator yaitu kinerja perusahaan aspek ekonomi, kinerja perusahaan aspek lingkungan dan kinerja perusahaan aspek sosial (Z). Dimana dalam tabel digabung menjadi satu yang menghasilkan nilai terendah sebesar 0,000 dan nilai tertinggi sebesar 1,350, nilai rata-rata sebesar 0,066, serta nilai standar deviasi sebesar 1,968. hasil tersebut menunjukkan nilai standar deviasi indikator kinerja keberlanjutan lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata standar deviasi untuk pengukuran lain. Maka data kinerja keberlanjutan yang telah diuji lebih beragam dibandingkan dengan pengukuran lain.

Uji Outer Model

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 4

	BS	CETR	GD	IT	LV	ROE	SP
BS	1,000						
CETR	0,037	1,000					
GD	0,018	-0,064	1,000				
IT	0,010	-0,031	-0,000	1,000			
LV	-0,095	-0,060	0,011	-0,002	1,000		
ROE	0,196	-0,121	0,087	0,015	-0,019	1,000	
SP	0,265	0,012	-0,062	0,092	-0,034	0,183	0,919

Sumber : Data sekunder yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji di atas dimana nilai korelasi antar konstruk lainnya nilai AVE merupakan nilai tertinggi di antara konstruk lainnya yang artinya telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Maka variabel ukuran dewan direksi, keberagaman *gender*, kinerja keberlanjutan, solvabilitas, *Return on Equity (ROE)*, dan perputaran persediaan memenuhi syarat diskriminan.

Uji Konstruk Realibilitas dan Validitas

Tabel 5

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	<i>Composite Reability</i>
CETR	1.000	1.000	1.000
BS	1.000	1.000	1.000
GD	1.000	1.000	1.000
SP	0.922	0.887	0.959
LV	1.000	1.032	0.941
ROE	1.000	1.000	1.000
IT	1.000	1.000	1.000

Sumber : Data sekunder yang diolah (2021)

Nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel penelitian harus menghasilkan nilai diatas 0,7. Maka variabel ukuran dewan, keberagaman *gender*, kinerja keberlanjutan, solvabilitas, *Return on Equity (ROE)* dan perputaran persediaan telah memenuhi kualifikasi nilai *cronbach's alpha*, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat realibilitas yang tinggi.

Nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari masing-masing variabel penelitian menghasilkan nilai diatas 0,5. Maka variabel ukuran dewan, keberagaman *gender*, kinerja keberlanjutan, solvabilitas, *Return on Equity (ROE)*, dan perputaran persediaan telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Nilai *Composite Reability* dari masing-masing variabel penelitian menghasilkan nilai diatas 0,6. maka variabel ukuran dewan, keberagaman *gender*, kinerja keberlanjutan, solvabilitas, *Return on Equity (ROE)* dan perputaran persediaan telah memenuhi *Composite Reability*, sehingga hasilnya menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas yang tinggi.

**Uji Inner Model
R Square**

Tabel 6

	Adjusted R Square
Penghindaran Pajak	0,018
Kinerja Keberlanjutan	0,003

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021)

Berdasarkan uji *R-Square* diatas menunjukkan bahwa nilai penghindaran pajak sebesar 0,018, dimana variabel ukuran dewan, keberagaman *gender*, kinerja keberlanjutan, solvabilitas, *Return on Equity (ROE)* dan perputaran persediaan dapat menjelaskan variabilitas konstruk penghindaran pajak sebesar 0,18 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Sedangkan kinerja keberlanjutan *R-Square* 0,003 yang berarti bahwa variabel ukuran dewan, keberagaman *gender*,

solvabilitas, *Return on Equity (ROE)* dan perputaran persediaan mampu menjelaskan varians kinerja keberlanjutan sebesar 0,3% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Model yang dijelaskan dalam dependen dan moderasi penelitian ini, masih dikategorikan lemah, karena *R-Square* yang semakin mendekati 100% akan lebih baik.

Goodness of Fit

Analisis *goodness of fit* digunakan untuk pembuktian kemahiran asumsi model dan mengukur seberapa baik atau semakin fit nilai yang dihasilkan dengan data. Rumus yang digunakan untuk mengukur ialah :

$$\begin{aligned}
 Q2 &= 1 - (1 - R12)(1 - R22) \\
 &= 1 - (1 - 0,018)(1 - 0,003) \\
 &= 1 - 0,979054 \\
 &= 0,020946
 \end{aligned}$$

Nilai yang dihasilkan dari relevansi prediksi sebesar 0,020946, dimana hasilnya lebih besar dari nol. Maka dapat disimpulkan bahwa model memiliki nilai prediksi atau model tersebut cocok dengan data tersebut. Semakin tinggi Q2, maka model dikatakan semakin baik atau semakin *fit* dengan data.

Path coefficient

Tabel 7

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Value</i>
<i>Brd.Sz->Tx.Av</i>	0,054	0,056	0,030	1,768	0,078
<i>Gdr.dvty->Tx.Av</i>	-0,052	-0,052	0,019	2,649	0,008
<i>Gdr.dvty-> Sus.Per</i>	-0,062	-0,060	0,044	1,422	0,156
<i>Sus.Per->Tx.Av</i>	0,020	0,029	0,039	0,518	0,605
<i>Levrge->Tx.Av</i>	-0,057	-0,066	0,022	2,615	0,009
<i>ROE->Tx.Av</i>	-0,132	-0,145	0,028	4,722	0,000
<i>Invtry Trnovr->Tx.Av</i>	-0,032	-0,036	0,012	2,560	0,011

Sumber : Data sekunder yang diolah (2021)

Specific Indirect Effects

Tabel 8

<i>Gdr.dvty->Sus.Per->Tx.Av</i>	-0.001	-0.001	0.002	0.501	0.617
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Sumber : Data sekunder yang diolah (2021)

Pengujian Hipotesis

Untuk melihat hipotesis dalam penelitian ditolak atau diterima dapat dilihat dari nilai signifikansi yang ditunjukkan pada *p-value* dan *t-statistic* melakukan prosedur *Bootstrapping*.

Hipotesis pertama

H1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Dengan nilai *p value* $0.078 > 0.05$ dan nilai *t-statistic* $1.768 < 1.96$, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Maka hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Sumantri *et al.*, (2018) dan Jamei (2017). Hal ini tidak membuktikan bahwa semakin besar jumlah dewan yang menjabat, semakin sedikit beban pajak yang dibayarkan. Perusahaan yang telah tercatat di BEI yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan publik yang telah berkembang dan sistemnya juga berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat diakses oleh publik dan juga dewan direksi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan juga diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga dewan direksi tidak banyak mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam hal penghindaran pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Idzniah dan Bernawati (2020), Zemzem dan Ftouhi (2013) dan Farida dan Prawira (2017).

Hipotesis Kedua

H2 : Keberagaman *gender* berpengaruh negatif terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Dari hasil uji analisis pada tabel 7 menunjukkan bahwa keberagaman *gender* memiliki nilai *p value* yang lebih kecil dari 0,05 dan *t-statistic* yang lebih besar dibandingkan 1,96, dimana hasil *p value* yang diperoleh sebesar 0.008 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,649. Maka dapat disimpulkan bahwa keberagaman *gender* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis kedua diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Richardson *et al.*, (2016), Hoseini dan Gerayli (2018) dan Lanis *et al.*, (2017). Penghindaran pajak perusahaan yang lebih tinggi lebih disukai oleh pemegang saham daripada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak lebih rendah. Manajemen harus menyadari preferensi para pemegang saham, dengan ditingkatkan pengawasan dan sumber daya yang ditawarkan oleh direktur wanita dapat membantu dalam penyelesaian masalah agensi tersebut. Buktinya seiring waktu berajalan, wanita semakin memegang peran yang lebih tinggi di posisi dewan dan manajemen. Wanita menunjukkan kualitas komunitas yang lebih baik seperti suka menolong dan lebih peka, sedangkan laki-laki memiliki lebih banyak karakteristik seperti menjadi lebih menonjol.

Hipotesis Ketiga

H3 : Keberagaman *gender* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keberlanjutan

Berdasarkan pengujian korelasi antar konstruk yang telah dirangkum pada Tabel 7 yang menunjukkan nilai *p value* dan *t statistic* untuk keberagaman *gender* terhadap kinerja keberlanjutan sebesar $0.156 > 0.05$ dan nilai *t statistic* sebesar $1.422 < 1.96$. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keberlanjutan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keberlanjutan sehingga hipotesis ketiga ditolak. hasil ini sejalan dengan penelitian Farida (2019), dijelaskan bahwa jika jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan tidak mampu mendorong perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Ketika sekelompok wanita minoritas dalam perusahaan, suara atau pendapat para dewan wanita

berisiko diabaikan. Hasil berbeda dengan penelitian Isa dan Muhammad (2014), Alazzani *et al.*, (2017), Khan *et al.*, (2019).

Hipotesis keempat

H4 : Kinerja keberlanjutan memiliki pengaruh terhadap hubungan antara keberagaman gender dan penghindaran pajak

Dari hasil uji analisis model diatas menunjukkan bahwa kinerja keberlanjutan tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keberagaman *gender*. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dimana antara konstruk kinerja keberlanjutan dan keberagaman *gender* memiliki nilai *p value* $0.617 > 0.05$ dan *t-statistic* $0.501 < 1.96$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menolak hipotesis yang keempat. Hasil dalam riset sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Vacca *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa keterlibatan dewan wanita dalam pengambilan keputusan perusahaan tidak mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan pengungkapan CSR. Sebagai perbandingan, hubungan antara penghindaran pajak dan pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh wanita yang menjabat sebagai CEO (*Chief Executive Officer*) di perusahaan. Pada perusahaan yang agresif pajak, CEO wanita meningkatkan komitmen terhadap kegiatan CSR untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Karena CEO adalah orang yang memiliki tanggung jawab pada jalannya perusahaan secara keseluruhan dan memiliki kuasa yang lebih besar dari perjalanan bisnis sebuah perusahaan. Hasil bertolak belakang dengan penelitian Jarboui *et. al* (2020) yang menyatakan bahwa kinerja keberlanjutan memediasi hubungan antara keberagaman *gender* terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini ditujukan untuk menguji ukuran dewan direksi, keberagaman gender dan kinerja keberlanjutan sebagai variabel moderasi antara hubungan keberagaman *gender* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Besar kecilnya jumlah dewan yang menjabat tidak menjamin besar kecilnya jumlah beban pajak yang dibayarkan.
2. Keberagaman *gender* berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dewan wanita memiliki standar etika dan moral yang lebih tinggi, menunjukkan pemikiran yang lebih kritis, dan membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan masuknya dewan wanita secara substansial mengurangi risiko penghindaran pajak.
3. Keberagaman *gender* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kinerja keberlanjutan perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika jumlah dewan direksi wanita dalam suatu perseroan sedikit, dewan direksi wanita tidak mampu mendorong perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan.
4. Kinerja keberlanjutan tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara keberagaman *gender* dan penghindaran pajak, yang artinya kinerja keberlanjutan tidak memediasi hubungan antara keberagaman *gender* dan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mengandung implikasi agar kedepannya perusahaan dapat lebih banyak merekrut wanita sebagai direktur agar dapat mengurangi risiko

penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki lebih banyak direksi wanita, memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan potensi besar yang dimiliki direktur wanita dalam dunia bisnis untuk menjadi lebih kuat, lebih bertanggung jawab secara sosial, dengan itu dapat lebih menarik para investor. Dengan masuknya direktur wanita tidak hanya akan memperkuat kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga dapat menciptakan tata kelola dan reputasi perusahaan yang lebih baik serta keadilan yang merata. Pemerintah juga dapat diuntungkan dengan masuknya direktur wanita pada perusahaan, yaitu bertambahnya sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan metode pengukuran lainnya untuk masing-masing variabel, diharapkan untuk bisa menambahkan beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak seperti umur direktur, masa jabatan direktur, kompensasi direktur atau lain sebagainya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas, serta peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas jangkauan sampel penelitian yang tidak hanya berasal dari pasar modal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alazzani, A., Hassanein, A., & Aljanadi, Y. (2017). Impact of gender diversity on social and environmental performance: evidence from malaysia. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(2), 266–83.
- Anuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: an interactive effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 150–160.
- Antwi, I. F. (2021). Bibliometric analysis: agency theory in accounting. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(1), 56–76.
- Barros, V., & Sarmiento, J. M. (2020). Board meeting attendance and corporate tax avoidance: evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, 8(1), 51–66.
- Benn, S., Abratt, R., & O’Leary, B. (2016). Defining and identifying stakeholders: views from management and stakeholders. *South African Journal of Business Management*, 47(2), 1–11.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh karakteristik eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Tax & Accounting Review*, 5(1), 1–9.
- Chen, J., Leung, W. S., & Goergen, M. (2017). The impact of board gender composition on dividend payouts. *Journal of Corporate Finance*, 43, 86–105.
- Chen, X., Na, H., Xue, W., & Xiaofei, T. 2014. Tax avoidance and firm value: evidence from china. *Nankai Business Review International* 5(1), 25–42.
- Chou, H. I., Chung, H., & Yin, X. (2013). Attendance of board meetings and company performance: Evidence From Taiwan. *Journal of Banking and Finance*, 37(11), 4157-4171.
- Chyz, J. A. (2013). Personally tax aggressive executives and corporate tax sheltering. *Journal of Accounting and Economics* , 56(2–3), 311-328.
- Cumming, D., Leung, T. Y., & Rui, O. (2015). Gender diversity and securities fraud.

Academy of Management Journal , 58(5), 1572–93.

- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702-732.
- Fallan, E., & Fallan, L. (2019). Corporate tax behaviour and environmental disclosure: strategic trade-offs across elements of CSR?. *Scandinavian Journal of Management*, 35(3), 101-142.
- Farida, D. N. (2019). Pengaruh diversitas gender terhadap pengungkapan sustainability development goals. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 89.
- Fuadah, L. L., & Kalsum, U. (2021). The impact of corporate social responsibility on firm value: the role of tax aggressiveness in indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 209–16.
- Gul, F. A., Bin, S., & Ng, A. C. (2011). Does board gender diversity improve the informativeness of stock prices?. *Journal of Accounting and Economics*, 51(3), 314–38.
- Hoseini, M., & Gerayli, M. S. (2018). The presence of women on the board and tax avoidance: evidence from tehran stock exchange. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, 3(9), 53–62.
- Hoseini, M., Gerayli, M. S., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: evidence from tehran stock exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212.
- Huang, J., & Kisgen, D. J. (2013). Gender and corporate finance: are male executives overconfident relative to female executives?. *Journal of Financial Economics*, 108(3), 822–39.
- Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804-827.
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of directors, audit committee, executive compensation and tax avoidance of banking companies in indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213.
- Jamei, R. (2017). Tax avoidance and corporate governance mechanisms: evidence from tehran stock exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638-644.
- Jarboui, A., Saad, M. K. B., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389-1408.
- Jati, A. W., Ulum, I., & Utomo, C. (2019). Tax avoidance, corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar dalam jakarta islamic index.” *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 214–25.
- Khan, I., Khan, I., & Senturk, I. (2019). Board diversity and quality of CSR disclosure: Evidence from pakistan. *Corporate Governance (Bingley)*, 19(6), 1187–1203.
- Kholbadalov, U. (2012). The relationship of corporate tax avoidance, cost of debt and institutional ownership: evidence from malaysia. *Atlantic Review of Economics*, 2.

- Kurniasih, T., & Sari, M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance.” *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is corporate social responsibility performance associated with tax avoidance?. *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–57.
- Lanis, R., Richardson, G., & Taylor, G. (2017). Board of director gender and corporate tax aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Business Ethics*, 144(3), 577–596.
- Levi, M., Li, K., & Zhang, F. (2014). Director gender and mergers and acquisitions. *Journal of Corporate Finance*, 28, 185–200.
- Liao, L., Lin, T. P., & Zhang, Y. (2018). Corporate board and corporate social responsibility assurance: evidence from china. *Journal of Business Ethics*, 150(1), 211–225.
- Liu, C. (2018). Are women greener? corporate gender diversity and environmental violations. *Journal of Corporate Finance*, 52, 118–142.
- Mais, R. G., & Patminingih, D (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the indonesia stock exchange. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(2), 230–43.
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh diversitas gender dewan direksi terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–11.
- Mangoting, Y., Gunadi, C., Tobing, F. P. D., & Putri, O. A. (2020). Governance structure, tax avoidance, and firm value. *Advances In Economics, Business And Management Research*, 158, 397–407.
- Mao, C. W., & Wu, W. C. (2019). Moderated mediation effects of corporate social responsibility performance on tax avoidance: evidence from china. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 26(1–2), 90–107.
- Mashayekhi, B., & Seyedi, S. (2015). Corporate governance and tax avoidance. *Journal of Accounting Knowledge*, 6(20), 83–103.
- Misral, M., Rahmayanti, S., & Sari, D. (2020). Pengaruh inventory turn over, return on assets dan debt to assets ratio terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2017.” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* ,10, 51–60.
- Muhammad, A . I., & Muhammad, S. (2014). The impact of board characteristics on corporate social responsibility disclosure: evidence from nigerian food product firms. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 1(12), 34–45.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–21.
- Ningrum, A. K., Suprapti, E., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance dengan gender sebagai

- variabel moderasi (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01), 63-71.
- Novita, N. (2016). Executives characters, gender and tax avoidance: a study on manufacturing companies in indonesia. *Advances In Economics, Business And Management Research*, 15, 92–95.
- Pareek, R., Sahu, T. N., & Gupta, A. (2021). Gender diversity and corporate sustainability performance: empirical evidence from india. *Vilakshan - XIMB Journal of Management*, 12(2), 142-155.
- Prasetyo, N. B. (2019). The role of gender diversity on the board of directors and tax avoidance. *Russian Journal Of Agricultural And Socio-Economic Sciences*, 87(3), 107–15.
- Prawira, A., & Farida, I. (2017). Corporate governance and tax aggresiveness, an evidence on manufacturing companies in indonesia. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 5(2), 134.
- Putra, M. A., Andreas & Nasrizal. (2018). Pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, gender diversity, koneksi politik, debt to equity terhadap penghindaran pajak dan manajemen laba sebagai variabel intervening. *Jurnal Ekonomi*, 26(4), 52-71.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 19(1), 1.
- Rao, K., & Tilt, C. (2016). Board composition and corporate social responsibility: the role of diversity, gender, strategy and decision making. *Journal of Business Ethics*, 138(2), 327–47.
- Rhee, C. S., Woo, S., & Kim, D. H. (2020). The effect of female employment on corporate sustainability in terms of tax avoidance. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1), 1–15.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in australia an empirical analysis. *Accounting Research Journal* 29(3), 313–331.
- Riguen, R., & Kachouri, M (2019). Corporate social responsibility, tax avoidance and board gender diversity : evidence from UK firms. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 5(4), 34–40.
- Salhi, B., Riguen, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2019). The mediating role of corporate social responsibility on the relationship between governance and tax avoidance: UK common law versus french civil law. *Social Responsibility Journal*, 16(8), 1149–68.
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 148–59.
- Shahab, Y., Ntim, C. G., Ye, C., Ullah, F., & Fosu, S. A. (2018). Environmental policy, environmental performance, and financial distress in china: do top management team characteristics matter?. *Business Strategy and the Environment*, 27(8), 1635-1652.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. (2018). Corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *ECo-Buss*, 1(2), 59–74.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163–85.
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: an empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38.
- Tarigan, J., & Samuel, H. 2015. Pengungkapan sustainability report dan kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2), 88–101.
- Vacca, A., Iazzi, A., Vrontis, D., & Fait, M. (2020). The role of gender diversity on tax aggressiveness and corporate social responsibility: evidence from italian listed companies. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5), 2007.
- Wirakusuma, M. G. (2019). Kepemilikan manajerial sebagai pemoderasi pengaruh kompensasi manajemen dan karakter eksekutif terhadap risiko pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 23(1), 17–31.
- Wulandari, T. A. (2019). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi di bursa efek indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–16.
- Yuni, N. P.A. I., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128.
- Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The effects of board of directors' characteristics on tax aggressiveness. *Research Journal in Finance and Accounting*, 4(4), 140–48.